

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

3.1 Sejarah Kota Payakumbuh

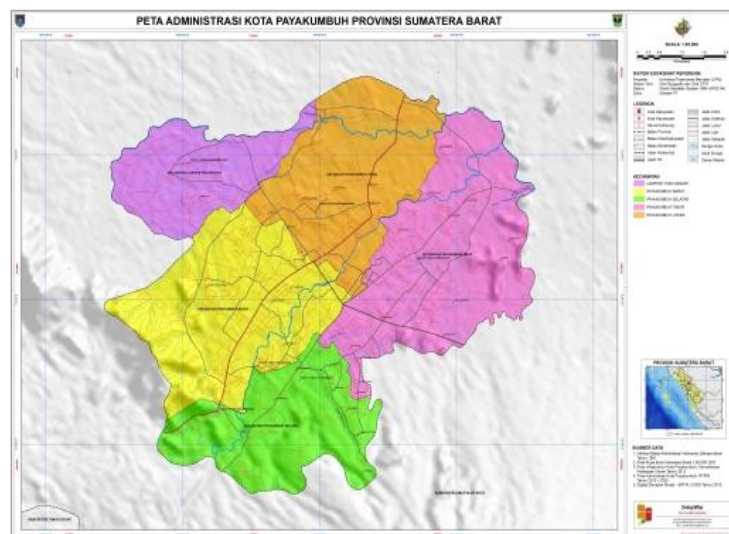
Kota Payakumbuh, terutama bagian pusatnya, didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejak Belanda terlibat dalam Perang Padri, wilayah ini berkembang menjadi tempat penyimpanan hasil pertanian kopi dan terus menjadi salah satu area administratif dari pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Menurut cerita rakyat setempat, terdapat sebuah nagari tertua dalam kota ini, yaitu nagari Aie Tabik. Pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan nagari tersebut dengan pusat kota saat ini. Jembatan ini kini lebih dikenal sebagai Jembatan Ratapan Ibu. Sebelum Indonesia merdeka, Payakumbuh sudah menjadi pusat layanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan, khususnya untuk Luhak Limo Puluah. Pada masa pemerintahan Belanda, Payakumbuh menjadi lokasi untuk asisten residen yang mengawasi wilayah Luhak Limo Puluah. Kemudian, pada masa pemerintahan Jepang, kota ini menjadi pusat administrasi pemerintah Luhak Limo Puluah.

Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 yang diumumkan pada 19 Maret 1956, dan dinyatakan sebagai kota kecil. Selanjutnya, hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 yang dikeluarkan pada 17 Desember 1970, yang mengukuhkan kota ini sebagai pemerintah daerah otonom dengan status Kotamadya Payakumbuh. Wilayah pemerintahan terbagi menjadi tiga kecamatan dengan 73 kelurahan yang diambil dari tujuh jorong yang sebelumnya ada di tujuh kanagarian saat itu. Pembagian wilayah terdiri dari Kecamatan

Payakumbuh Barat dengan 31 kelurahan, Kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan, dan Kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan. Sebelum tahun 1970, Payakumbuh merupakan bagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga berfungsi sebagai ibu kota kabupaten tersebut.

Pada tahun 2008, sejalan dengan perkembangan yang ada, dilakukan pemekaran wilayah kecamatan, sehingga Payakumbuh kini memiliki lima kecamatan, dengan delapan kanagarian dan 76 kelurahan. Kecamatan yang baru terbentuk mencakup Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, yang terdiri dari enam kelurahan di dalam kanagarian Lampasi, serta Kecamatan Payakumbuh Selatan, yang terdiri dari sembilan kelurahan dalam dua kanagarian yaitu Limbukan dan Aur Kuning. Kecamatan Payakumbuh Barat mencakup 22 kelurahan di dalam Kanagarian Koto Nan IV. Kecamatan Payakumbuh Timur memiliki 14 kelurahan yang tersebar di tiga kanagarian yaitu Aie Tabik, Payobasuang, dan Tiakar. Sementara itu, Kecamatan Payakumbuh Utara mencakup 25 kelurahan di dalam Kanagarian Koto Nan Godang.

Gambar 1.1 Letak Geografis Kota Payakumbuh.



Sumber: <https://www.scribd.com/doc/169002432/2009-10-12-Peta-Adminidrasi-Kota-Payakumbuh-BNPN>

3.1.1 Kependudukan

Pada tahun 2024, jumlah warga di Kota Payakumbuh mencapai 146.730 orang dengan tingkat kepadatan 1.825 orang per kilometer persegi dalam area seluas 80,43 kilometer persegi. Kecamatan Payakumbuh Barat adalah yang paling padat dengan 3.001 orang per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Payakumbuh Selatan memiliki kepadatan paling rendah, yaitu 881 orang per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk mengalami perubahan, dimulai dengan 1,74% di 2020, menurun menjadi 1,15% di 2021, meningkat lagi menjadi 1,52% di 2022, dan kembali menurun menjadi 1,39% di 2023, serta mencapai 1,37% di 2024.

Rasio ketergantungan di tahun 2023 tercatat sebanyak 48, dengan rasio ketergantungan muda sebesar 37,46 dan tua 10,46. Distribusi kelompok usia menunjukkan bahwa 25,33% penduduk berusia antara 0 hingga 14 tahun, 67,60% antara 15 hingga 64 tahun, dan 7,07% berusia 65 tahun ke atas. Rasio jenis kelamin di tahun 2024 adalah 101,08, yang menunjukkan proporsi gender yang seimbang. Pada tahun 2023, jumlah rumah tangga tercatat sebanyak 34.844, meningkat dari 34.323 pada tahun 2022, dengan rata-rata anggota dalam satu rumah tangga adalah 4,16 orang. Dalam aspek keagamaan, 98,62% penduduk memeluk agama Islam, diikuti oleh Protestan 0,64%, Katolik 0,36%, dan agama lainnya seperti Buddha dan Konghucu masing-masing sebesar 0,01%. Informasi ini mencerminkan karakteristik demografis dan sosial yang penting dalam merencanakan pembangunan di Kota Payakumbuh (BPS, 2024).

3.1.2 Perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Payakumbuh

Perubahan dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat di Kota Payakumbuh telah menunjukkan kemajuan yang nyata seiring dengan pertumbuhan serta pergeseran yang berlangsung di wilayah ini. Kota Payakumbuh, yang berada di Provinsi Sumatera Barat, memiliki beragam potensi ekonomi, didorong oleh kekayaan sumber daya alam, kebudayaan, dan tradisi masyarakat yang melimpah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Payakumbuh dengan menggunakan harga berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp8,26 triliun, meningkat dari Rp7,61 triliun pada tahun 2022 dan Rp6,84 triliun di tahun 2021. PDRB yang dihitung dengan harga konstan tahun 2010 untuk tahun 2023 adalah Rp5,70 triliun. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023 tercatat sebesar 5,13%, naik dari 4,55 % pada tahun 2022 dan 3,17 % di tahun 2021. Komposisi PDRB berdasarkan sektor usaha menunjukkan bahwa tiga sektor utama mendominasi: perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (21,36%); industri pengolahan (17,16%); dan konstruksi (13,42%). Sektor perdagangan besar dan eceran melaporkan nilai tambah bruto sebesar Rp1,76 triliun, sedangkan sektor industri pengolahan mencatat Rp1,41 triliun. Sektor jasa pendidikan dan layanan administrasi pemerintah masing-masing memberikan kontribusi sebesar 10,34 % dan 8,08%. Tingkat inflasi di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 terpantau sebesar 2,47 %, menurun dari 6,88 % pada tahun 2022. Inflasi tertinggi terdapat pada kategori transportasi (6,89%), makanan, minuman, dan tembakau (4,50 %), serta perawatan pribadi dan layanan lainnya (4,36%). Unsur utama penyebab inflasi adalah tarif transportasi udara, cabai merah, dan rokok kretek filter (BPS, 2024).

Dilihat dari perkembangan sosial, masyarakat di Kota Payakumbuh mengalami berbagai perubahan yang menunjang kemajuan ekonomi serta tantangan dalam kesejahteraan. Kota ini masih berhadapan dengan masalah kemiskinan dan ketidakmerataan akses terhadap layanan sosial, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, telah diterapkan program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha, meskipun fasilitas dan infrastruktur yang ada masih terbatas. Selain itu, perkembangan di sektor perdagangan dan jasa mendorong lebih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menghadirkan tantangan tertentu dalam pengaturan tata ruang dan

ketertiban kota. Pemerintah Kota Payakumbuh mencoba mengatasi hal ini melalui berbagai inisiatif pengelolaan dan penataan agar aktivitas ekonomi informal ini dapat memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi sambil tetap menjaga ketertiban umum. Keberadaan Payakumbuh yang strategis sebagai pintu masuk di Sumatera Barat juga memperkuat pengembangan potensi ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dengan memprioritaskan sektor UMKM, industri kreatif, dan pariwisata yang mengangkat budaya lokal.

3.1.3 Pendidikan Kota Payakumbuh

Pendidikan di Kota Payakumbuh mengalami kemajuan yang berarti dan menyeluruh, meliputi berbagai tingkat pendidikan mulai dari TK hingga universitas. Kota Payakumbuh memiliki sistem pendidikan yang menyeluruh, dengan total 112 taman kanak-kanak (3 TK negeri dan 109 TK swasta) yang melayani 3.026 anak dan didukung oleh 465 pengajar. Di jenjang pendidikan dasar, terdapat 75 Sekolah Dasar (SD) yang mengikuti 18.326 siswa dan 1.416 guru, dengan rasio siswa per guru 13:1. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), terdapat 24 sekolah yang menampung 8.195 siswa dan 740 guru, menghasilkan rasio 11:1. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), terdapat 9 institusi (5 SMA negeri dan 4 SMA swasta) dengan total 4.170 siswa dan 378 pengajar. Selain itu, ada 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (3 negeri dan 6 swasta) yang mencakup 3.831 siswa dan 351 guru. Kota ini juga memiliki lembaga pendidikan keagamaan, termasuk 3 Madrasah Aliyah (MA), 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD mencapai 98,42%, SMP 91,62%, dan SMA serta setara 79,86%. Selain itu, kota ini juga menyediakan pendidikan kesetaraan dan sektor pendidikan nonformal dengan 17 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) serta 6 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tenaga pengajar di PAUD terdiri dari 102 orang yang berijazah S1 dan 151 orang dengan ijazah D4/S1 Kependidikan. Fasilitas perpustakaan tersedia di berbagai tingkat sekolah, dan di Kota Payakumbuh terdapat 2 perguruan

tinggi dengan total 3.705 mahasiswa. Tingkat Melek Huruf untuk masyarakat berusia 15 tahun ke atas adalah 99,85%, dengan rata-rata lama sekolah 10,78 tahun dan Harapan Lama Sekolah 14,30 tahun (BPS, 2024).

Kota Payakumbuh memiliki visi dan misi dalam mewujudkan Kota Payakumbuh menjadi Kota yang maju dan sejahtera.

Visi Kota Payakumbuh

“Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota Maju, Sejahtera, Dan Relegius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Yang Berlandaskan Pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Misi dari Kota Payakumbuh :

1. Menjadikan Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi kerakyatan di Sumatra Barat.
2. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, profesional, dan bebas KKN
3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama ditengah masyarakat sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
4. Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Melakukan revitalitas nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat lokal dalam membangun masyarakat dan kota Payakumbuh.
7. Mengoptimalkan pembangunan insfrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai RTRW kota Payakumbuh.

3.2 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Indonesia, termasuk di Kota Payakumbuh, memiliki sejarah yang dimulai pada 3 Maret 1950, ketika Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Yogyakarta. Ini adalah langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat setelah proklamasi

kemerdekaan, saat negara kita berusaha membangun fondasi pemerintahan yang kuat dan efektif. Seiring berjalannya waktu, Satpol PP mengalami berbagai perubahan, baik dalam nama maupun struktur organisasi. Pada tahun 1960, keberadaan mereka mulai meluas ke luar Jawa dan Madura, dengan dukungan dari pihak militer. Nama Kesatuan Polisi Pamong Praja kemudian berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya, dan akhirnya dikenal sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Perubahan ini mencerminkan perkembangan peran mereka dalam menjaga ketertiban di masyarakat yang semakin kompleks.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 1974, Satpol PP diakui sebagai perangkat wilayah yang memiliki tugas penting dalam melaksanakan dekonsentrasi. Tugas utama mereka adalah menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat dari berbagai potensi gangguan. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Satpol PP dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga.

*Di Kota Payakumbuh, Satpol PP berfungsi sebagai tangan kanan Walikota dalam urusan pemerintahan, khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Mereka tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menangani pelanggaran peraturan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait keamanan. Dengan pendekatan yang lebih humanis, Satpol PP berusaha membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan saling mendukung.

Setiap tahun, tanggal 3 Maret diperingati sebagai Hari Jadi Satpol PP. Peringatan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi momen refleksi untuk menegaskan komitmen mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini adalah pengingat akan perjalanan panjang yang telah dilalui oleh Satpol PP, serta dedikasi mereka untuk menciptakan Kota Payakumbuh yang lebih baik bagi semua warganya

a. Visi dan Misi

Sebagai upaya yang strategis dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib tentram serta sejahtera. Satuan polisi pamong praja Kota Payakumbuh hadir dengan visi yang berpihak pada ketertiban umum bagi masyarakat yang aman dan sejahtera.

Visi Satuan polisi pamong praja Kota Payakumbuh:

“ Terwujudnya Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang Tangguh Tanggap dan Profesional”.

Untung mendukung terwujudnya visi di atas, dengan itu Satpol PP Kota Payakumbuh menetapkan Misi yang berorientasi pada pelayanan berkualitas dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Misi dari Satuan Pamong Praja Kota Payakumbuh:

1. Menegakkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran.

b. Tupoksi Satpol PP

Peraturan Walikota (Perwako) Kota Payakumbuh mengenai Satpol PP secara umum mengatur fungsi dan tugas Satpol PP, serta ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Perda dan Perkada. Salah satu Perwako yang relevan adalah Perwali Kota Payakumbuh No. 12 Tahun 2019 mengenai Penetapan Standar Biaya Khusus untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Perwako ini mengatur mengenai standar biaya khusus yang berkaitan dengan kegiatan Satpol PP, termasuk biaya penanganan pelanggaran Perda. Selain itu, Perwako lainnya, seperti Perwako Nomor 82 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan, turut mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda.(PERWAKO Kota Payakumbuh No. 12 Tahun 2019).

Maka disusunlah tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Tugas Pokok:

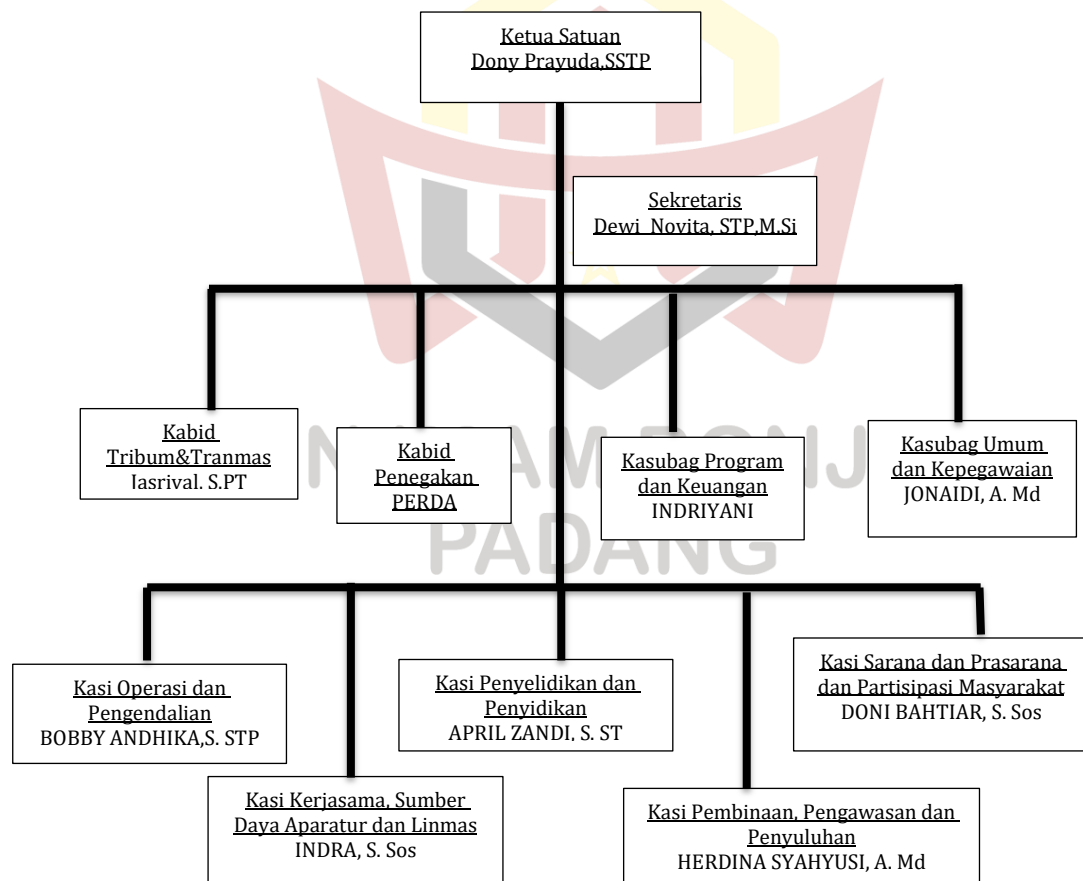
Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
3. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

c. Struktur Organisasi Satpol P



3.3 Sejarah Dinas Sosial

Dinas Sosial di Indonesia memiliki latar belakang yang panjang dan berhubungan erat dengan usaha pemerintah dalam menangani

berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Sejak era penjajahan, sudah ada perhatian terhadap permasalahan sosial, walaupun dalam bentuk yang sangat terbatas. Pada era pemerintahan kolonial Belanda, sejumlah lembaga sosial didirikan untuk mengatasi isu kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, walaupun tujuan utama mereka adalah untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi koloni.

Setelah negara ini merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai merancang sistem sosial yang lebih terorganisir. Pada tahun yang sama, Kementerian Sosial Republik Indonesia dibentuk sebagai salah satu kementerian dalam kabinet yang pertama. Kementerian ini memiliki tugas mengelola berbagai program sosial, termasuk menangani masalah kemiskinan, perlindungan untuk anak, dan rehabilitasi sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, kementerian ini mengalami beberapa perubahan nama dan struktur, tetapi tetap mengedepankan isu-isu sosial.

Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, terjadi perubahan besar dalam struktur pemerintahan, termasuk dalam bidang sosial. Dinas Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai diorganisir untuk mendekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dinas Sosial bertugas melaksanakan berbagai program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial, termasuk penanganan orang miskin, penyandang disabilitas, dan perlindungan sosial (Gilby, 2023)

Seiring berjalannya waktu, Dinas Sosial terus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tantangan sosial yang baru. Pada tahun 2000-an, fokus Dinas Sosial mulai diperluas untuk mencakup isu-isu seperti penanggulangan bencana, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam melaksanakan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Hingga kini, Dinas Sosial terus berusaha meningkatkan kualitas

layanan sosial serta memperkuat jaringan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat sipil. Dengan demikian, Dinas Sosial memainkan peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia (Gilby,2023).

a. Visi dan Misi dinas sosial

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dinas sosial Kota Payakumbuh membentuk suatu visi dan misi yang berbunyi:

Visi:

“Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat menuju Kota Payakumbuh yang bermartabat.”

Misi:

“Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penanganan dan pelayanan PMKS serta peningkatan partisipasi potensi sumber daya kesejahteraan sosial.”

b. Tupoksi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Payakumbuh memiliki tanggung jawab untuk membantu Walikota dalam mengelola aspek pemerintahan di sektor sosial. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Dinas Sosial memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

1. Menyusun kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan pemerintahan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Payakumbuh.
2. Melatih dan memantau pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial agar dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
3. Melakukan pengawasan, penilaian, dan pelaporan mengenai pelaksanaan program serta aktivitas sosial yang telah

dikerjakan.

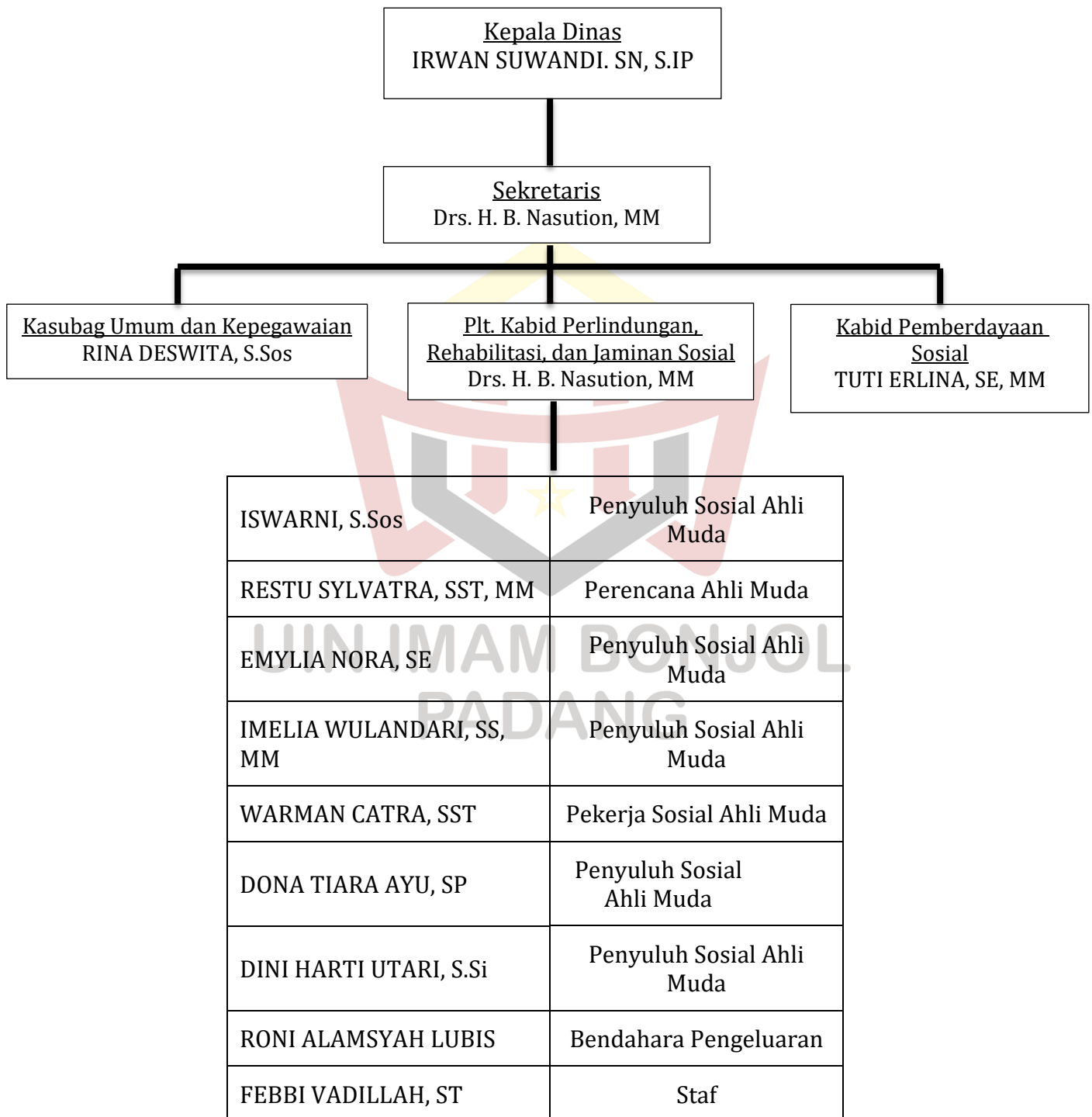
4. Memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan, seperti penanganan terhadap korban kekerasan, masalah yang dihadapi pekerja migran, dan individu dengan masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
5. Menjalankan fungsi lainnya yang ditugaskan oleh Walikota yang berkaitan dengan bidang sosial sesuai dengan peran dan tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas utama tersebut, Dinas Sosial Kota Payakumbuh mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Sekretariat dan dua bidang utama, yaitu:

1. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi, dan Jaminan Sosial, yang bertanggung jawab dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan di bidang perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial.
2. Bidang Pemberdayaan Sosial, yang mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, Dinas Sosial juga menyediakan layanan seperti pengurusan izin pemakaman, rekomendasi bantuan sosial, pendampingan sosial, registrasi lembaga kesejahteraan sosial, dan pengelolaan data sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

c. **Struktur Dinas Sosial**



YONITA AKRONA	Staf
RISWANDI	Staf
PUTRI TANIA, SE	Staf
ADELLA YOHANA, A.Md	Staf
HERMA MELA FADJRI	Staf
KETTY KARTIKA CHANDRA	Staf
RAHMI	Staf
BETRI YOSA, A.Md	Staf

Sumber: Payakumbuh, 25 Mei 2024
Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**